

**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
PERIODE PELAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2018  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA**

018.09.1700.238027.000.KD



**Jl. Raya Mapanget PO. BOX 1004**

**Manado 95001**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Satuan Kerja BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA dengan kode satker (018.09.1700.238027.000.KD) merupakan salah satu Entitas Akuntansi di bawah Kementerian Pertanian, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran/barang dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi dan data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran periode Semester I Tahun 2018 Satuan Kerja BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA dengan kode satker (018.09.1700.238027.000.KD) telah disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang kami susun bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Kementerian Pertanian secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian bisa menjadi lebih baik.



MANADO, Nopember 2018

Kuasa Pengguna Barang

Dr. Ismail Maskromo, M.Si

NIP. 196711171993031002

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA .....	
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Hukum .....	1
B. Entitas Pelaporan.....	3
C. Periode Pelaporan .....	3
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA .....	3
A. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang .....	5
B. Penyajian Barang Milik Negara sesuai Bagan Akun Standar .....	6
C. Kebijakan Kapitalisasi Barang Milik Negara .....	6
D. Rekonsiliasi Nilai Barang Milik Negara .....	7
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN .....	9
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA .....	10
A. Saldo Awal .....	10
B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara .....	11
C. Rincian Mutasi Barang Milik Negara .....	12
V. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA .....	40
A. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara .....	40
B. Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara .....	41
C. Informasi Terkait Barang Milik Negara Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang .....	42
D. Barang Milik Negara Berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya .....	42
E. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara .....	42
F. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah .....	43

LAMPIRAN

Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca

Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel

Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel

Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud

Laporan Barang Kuasa Pengguna KDP

Laporan Kondisi Barang

Laporan Posisi Persediaan di Neraca

Laporan Barang Persediaan

Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian dari KPKNL

Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN

SPM/SP2D dan Kwitansi/Faktur Pembelian Belanja Modal

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA  
(018.09.1700.238027.000.KD)  
PERIODE PELAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2018**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;